

## Bermitra untuk Menanggulangi Bencana

Jalal dan Fajar Kurniawan  
Social Investment Indonesia

Indonesia adalah sebuah negara yang akrab dengan bencana. Dari 10 besar bencana yang pernah dikenal umat manusia, 4 di antaranya terjadi di Indonesia. Letusan Toba, Tambora, serta Krakatau sangat terkenal dahsyatnya, mengubah iklim di seluruh penjuru dunia selama bertahun-tahun. Persis 10 tahun yang lalu, Tsunami terbesar dalam sejarah modern menghantam pantai barat Sumatera.

Karenanya, sangat masuk akal apabila kita di Indonesia mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang tepat dalam menghadapi bencana alam. Posisi geografis kita yang berada pada pertemuan lempeng dengan deretan gunung api yang aktif memang mengharuskan kita proaktif dalam kebencanaan. Belum lagi, beragam bencana ‘alam’ yang sesungguhnya diciptakan oleh perbuatan manusia juga menambah beban masyarakat kita secara umum, semakin mengharuskan kita berpikir dan bertindak strategik dalam isu-isu kebencanaan.

Sayangnya, hal itulah yang belum cukup tercermin dalam perilaku sebagian besar perusahaan. Kalau kita perhatikan dengan saksama, kita akan merasa gundah, lantaran apa yang dilakukan oleh mereka itu benar-benar tak sesuai dengan apa yang seharusnya. Kebanyakan perusahaan masih saja berkuat di tindakan-tindakan artifisial. Ketika bencana alam datang—misalnya di Banjarnegara baru-baru ini—banyak perusahaan kemudian berbondong-bondong datang dengan bantuan berupa makanan instan, obat-obatan, dan pakaian. Mereka menyerahkan secara simbolis bantuan itu, berfoto-ria dengan berbagai otoritas setempat, dan segera meninggalkan lokasi.

Tindakan itu tentu tidaklah mubazir, namun jauh dari memadai. Indonesia membutuhkan pihak-pihak yang mau bekerjasama mengembangkan kapasitas masyarakat dalam bersiap menghadapi bencana (*disaster preparedness*), melaksanakan tanggap bencana (*disaster response*) dengan komprehensif, hingga melaksanakan pembangunan kembali seluruh sendi kehidupan masyarakat menjadi lebih baik (*build back better*). Yang disebut terakhir ini kini telah menjadi standar dalam penanggulangan bencana di level global, lantaran masyarakat yang terkena bencana memang harus dipulihkan setidaknya seperti sedia kala, plus kemampuan untuk menghadapi bencana di masa mendatang.

Telah lama diketahui bahwa sesungguhnya persiapan menghadapi bencana sangatlah penting. Masyarakat yang tahu persis bagaimana bertindak ketika bencana datang telah dibuktikan lebih sedikit korbanannya dan lebih cepat pulih. Demikian juga, sesungguhnya investasi dalam persiapan menghadapi bencana ini sangatlah menguntungkan. Dalam sebuah konferensi kebencanaan yang menghasilkan Protokol Hyogo, disebutkan bahwa setiap dolar yang diinvestasikan untuk persiapan menghadapi bencana nilainya sama dengan 4 dolar tanggap bencana. Ini jelas merupakan investasi yang sangat menguntungkan.

Sayangnya, perusahaan-perusahaan di Indonesia masih sangat sedikit yang mau ikut serta dalam investasi dalam persiapan ini. Mungkin—seperti yang banyak diduga oleh para aktivis kebencanaan—investasi ini tidak akan mudah dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan perusahaan. Karena, bila investasi itu sukses membuat masyarakat menjadi mampu menghadapi bencana, maka kerusakan yang timbul menjadi relatif kecil atau bahkan bencana bisa dihindari sama sekali. Ini membuat perusahaan sulit ‘mencari muka’.

Dalam perhitungan-perhitungan yang lebih mutakhir—misalnya yang dilakukan oleh *Prudence Foundation* di awal tahun 2014—sesungguhnya persiapan menghadapi bencana itu lebih tinggi lagi nilainya. Dengan semakin jelas dan kerapnya bencana-bencana akibat perubahan iklim, maka mau tidak mau persiapan ini dikaitkan dengan adaptasi terhadap perubahan iklim. Integrasi antara persiapan menghadapi bencana dengan adaptasi perubahan iklim ini membuat perusahaan melakukan satu investasi untuk dua hal sekaligus. Tentu kembalian investasinya semakin besar untuk setiap dolar, atau rupiah, yang dicurahkan.

Dalam hal tanggap bencana, masih banyak sekali ruang perbaikan yang bisa dilakukan. Perusahaan-perusahaan kini masih terlampau kerap hanya memanfaatkan sumberdaya finansialnya saja. BUMN-BUMN, misalnya, hanya memanfaatkan pos anggaran kebencanaan di anggaran PKBL-nya. Padahal, ada banyak hal lain yang bisa dilakukan untuk benar-benar membantu masyarakat yang terkena bencana secara optimal.

Misalnya, perusahaan bisa memanfaatkan produk-produknya untuk membantu masyarakat. Perusahaan makanan, farmasi dan pakaian jelas dapat melakukan itu. Demikian juga dengan perusahaan teknologi informasi, logistik, dan sebagainya. Bisnis inti mereka sangatlah bermanfaat untuk membantu siapapun yang sedang ditimpa musibah bencana. Perusahaan juga bisa memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan pekerjanya yang terlatih dalam kebencanaan (ada banyak perusahaan yang memiliki ahli-ahli di bidang ini!). Perusahaan bisa pula mengumpulkan sumberdaya tambahan dari pekerja, kontraktor, hingga konsumennya, untuk disumbangkan secara bersama-sama. Kalau kebetulan perusahaan itu merupakan perusahaan multinasional, pengumpulan sumberdaya malahan bisa melintasi batas-batas negara Indonesia.

Namun, bila perusahaan ingin benar-benar membantu masyarakat, maka ia tak bisa berhenti di tanggap bencana. Masyarakat kita membutuhkan uluran tangan yang jauh lebih dalam lagi. Mungkin tidak dari setiap perusahaan, namun bila perusahaan tertentu memiliki keterkaitan erat dengan masyarakat di wilayah bencana—misalnya sebagai bagian dari rantai pasokan, asal tenaga kerja, atau konsumen—maka perusahaan bisa berinvestasi lebih jauh. Tentu tak elok buat perusahaan meninggalkan begitu saja pemangku kepentingannya untuk membangun dirinya sendiri.

Ada beragam contoh bagaimana perusahaan yang berinvestasi dalam pemulihan kehidupan mereka yang terkena bencana kemudian mendapatkan beragam keuntungan. Di punggung Gunung Merapi, masyarakat peternak penghasil susu di sana membangun kehidupannya kembali dengan bantuan perusahaan makanan yang sebelum bencana mendapatkan pasokan susu dari wilayah itu. Mereka merencanakan bersama ruang hidup yang lebih baik, sistem produksi yang lebih handal, dan seterusnya. Dampaknya kini bisa disaksikan, betapa perusahaan bisa mendapatkan pasokan yang lebih baik, dan masyarakat peternak di sana telah pulih sepenuhnya.

Satu hal yang tak bisa dilupakan adalah kerjasama dengan beragam pihak. Baik dalam persiapan menghadapi bencana, tanggap bencana, maupun pemulihan kehidupan masyarakat, perusahaan tak bisa hanya menggunakan sumberdayanya sendiri. Selain terlampau berat, perusahaan memang tidak memiliki seluruh hal yang dibutuhkan. Oleh karena itu, sebagaimana yang ditunjukkan oleh kasus-kasus penanggulangan bencana yang berhasil, perusahaan-perusahaan bekerja sama dengan otoritas nasional dan daerah (BNPB serta perwakilannya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota), berbagai organisasi masyarakat sipil yang memang kompetensi intinya ada dalam kebencanaan, dan organisasi lainnya, termasuk donor. Dengan kondisi Indonesia yang seperti ini, kemitraan perusahaan dengan organisasi-organisasi itu adalah keniscayaan.

*Jalal adalah ketua dewan penasihat (chairperson of advisory board) pada Social Investment Indonesia. Ia juga merupakan fellow dalam ekonomi hijau pada program IDEAS di Massachusetts Institute of Technology.*

*Fajar Kurniawan* adalah pendiri dan managing partner Social Investment Indonesia dan alumni program social enterprise pada Mosaic Summer School, Cambridge University.